



■ ■ ■ BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DIENGKAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- bahwa selaras dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta pernyataan alokasi dan rencaha belanja yang dibuat oleh dana ex ante sehingga menyebabkan pergeseran belanja antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022;

- bahwa meningkat pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diambil Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Mengatasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkembangan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Menambahayaan Persepsiornan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6483);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelegaranan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keberangkatan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelegaranan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaranan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 625);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Berasumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MENUTUPKAN :

Menetapkan : I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENJALAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.038.790.195.694,00 berkurang sebesar Rp2.281.466.644,00 sehingga menjadi Rp1.036.508.729.050,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:			
a. Sementara		Rp	1.038.790.195.694,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	(2.281.466.644,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp	1.036.508.729.050,00

2.	Belanja Daerah			
a.	Semula	Rp	1.128.602.035.584,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	(72.093.306.534,00)	Rp 1.056.506.729.050,00
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan			
3.	Pembayaran Daerah			
a.	Penerimaan Pembayaran			
1) Semula	Rp	89.811.839.890,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(89.811.839.890,00)	Rp 20.000.000.000,00	
	Jumlah penerimaan pembayaran setelah perubahan			
b.	Pengeluaran Pembayaran			
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	Rp 20.000.000.000,00	
	Jumlah pengeluaran pembayaran setelah perubahan			
	Jumlah pembayaran neto setelah perubahan	Rp		
	Bias lebih pembayaran anggaran setelah perubahan	Rp		

Pasal 3

Urusan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Pengjabaran APBD yang Didiklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembayaran;
2. Lampiran II Pengjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaran;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Hilang;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Bantuan Kesejahteraan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembayaran;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-BDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembayaran;
10. Lampiran X Sinergitas Seluruh Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbaikan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Perubahan Pengjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini diungkapkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkoan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Dinandangkan di Tambolaka
pada tanggal 04 Maret 2022
P.J. SECRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

FRANSISKUS M. ADU LALO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR

Selisan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM


HINDA P. NURCHAYANI, S.H.
NIP. 19761202 300801 2 010

Lampiran I : Peraturan Bupati Sumba Barat Daya
 Nomor : 07 Tahun 2022
 Tanggal : 02 Maret 2022

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.049.189.395	33.049.189.395	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	16.265.675.128	16.265.675.128	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.116.000.000	1.116.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.116.000.000	1.116.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.116.000.000	1.116.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.912.757.450	2.912.757.450	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.912.757.450	2.912.757.450	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.912.757.450	2.912.757.450	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	10.800.000	10.800.000	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	10.800.000	10.800.000	0	0 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	10.800.000	10.800.000	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000	50.000.000	0	0 %

4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.785.117.678	3.785.117.678	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	3.785.117.678	3.785.117.678	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.785.117.678	3.785.117.678	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.112.985.742	3.112.985.742	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.874.190.000	1.874.190.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	850.910.000	850.910.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	320.510.000	320.510.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	530.400.000	530.400.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	983.280.000	983.280.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	983.280.000	983.280.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.027.245.742	1.027.245.742	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	725.579.750	725.579.750	0	0 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	7.125.000	7.125.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	81.180.000	81.180.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	12.000.000	12.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	34.320.000	34.320.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	169.454.750	169.454.750	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	421.500.000	421.500.000	0	0 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	111.847.992	111.847.992	0	0 %

4.1.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	111.847.992	111.847.992	0	0 %
4.1.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	42.288.000	42.288.000	0	0 %
4.1.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	42.288.000	42.288.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	6.600.000	6.600.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	6.600.000	6.600.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.190.000	104.190.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.190.000	104.190.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	36.740.000	36.740.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	8.000.000	8.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	28.740.000	28.740.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	211.550.000	211.550.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	210.000.000	210.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	210.000.000	210.000.000	0	0 %
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	550.000	550.000	0	0 %
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	550.000	550.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.075.077.120	7.075.077.120	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.075.077.120	7.075.077.120	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.075.077.120	7.075.077.120	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.075.077.120	7.075.077.120	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.595.451.405	6.595.451.405	0	0 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	108.000.000	108.000.000	0	0 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	108.000.000	108.000.000	0	0 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	108.000.000	108.000.000	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %

4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.04.13.03.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	63.115.405	63.115.405	0	0 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	63.115.405	63.115.405	0	0 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	63.115.405	63.115.405	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.644.336.000	2.644.336.000	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.644.336.000	2.644.336.000	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.644.336.000	2.644.336.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	933.167.232.342	930.885.765.698	(2.281.466.644)	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	908.705.749.000	906.424.282.356	(2.281.466.644)	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	692.398.252.000	690.116.785.356	(2.281.466.644)	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.863.480.000	8.863.480.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.676.827.000	4.676.827.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.972.338.000	1.972.338.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	172.346.000	172.346.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	114.974.000	114.974.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.113.000	8.113.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.000	56.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.918.826.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.331.762.000	457.331.762.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	457.331.762.000	457.331.762.000	0	0 %

4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.282.043.000	156.547.177.150	(734.865.850)	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	275.372.000	275.372.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.430.844.000	13.430.844.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.583.111.000	20.583.111.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.807.779.000	3.801.001.150	(6.777.850)	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.873.902.000	7.873.902.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.698.410.000	2.698.410.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	11.744.328.000	11.744.328.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.499.163.000	17.499.163.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.105.031.000	9.105.031.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	36.170.480.000	36.051.392.000	(119.088.000)	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.557.107.000	9.948.107.000	(609.000.000)	6 %
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.322.230.000	7.322.230.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	12.714.286.000	12.714.286.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	68.920.967.000	67.374.366.206	(1.546.600.794)	2 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	28.851.451.000	28.851.451.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.774.000.000	3.774.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.412.883.000	10.412.883.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.529.920.000	5.232.640.000	(1.297.280.000)	20 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	646.440.000	443.400.000	(203.040.000)	31 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.942.773.000	9.940.290.206	(2.482.794)	0 %

4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akkreditasi Puskesmas	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	796.714.000	752.916.000	(43.798.000)	5 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.398.413.000	6.398.413.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	397.400.000	397.400.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	402.873.000	402.873.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	768.100.000	768.100.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	2.301.731.000	2.301.731.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	2.301.731.000	2.301.731.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	2.301.731.000	2.301.731.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	214.005.766.000	214.005.766.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	214.005.766.000	214.005.766.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	214.005.766.000	214.005.766.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.461.483.342	24.461.483.342	0	0 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.461.483.342	24.461.483.342	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.461.483.342	24.461.483.342	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.886.221.003	4.886.221.003	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.900.902.336	3.900.902.336	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.900.576.570	7.900.576.570	0	0 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.162.669	5.162.669	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.768.620.764	7.768.620.764	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.573.773.957	72.573.773.957	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.573.773.957	72.573.773.957	0	0 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	51.755.080.000	51.755.080.000	0	0 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	51.755.080.000	51.755.080.000	0	0 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	51.755.080.000	51.755.080.000	0	0 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.818.693.957	20.818.693.957	0	0 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.818.693.957	20.818.693.957	0	0 %
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	18.000.000	18.000.000	0	0 %

4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	20.800.693.957	20.800.693.957	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.038.790.195.694	1.036.508.729.050	(2.281.466.644)	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	687.889.916.740	628.574.355.150	(59.315.561.590)	9 %
5.1.01	Belanja Pegawai	351.901.903.246	332.723.797.022	(19.178.106.224)	5 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	266.290.468.784	247.936.537.560	(18.353.931.224)	7 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	206.923.756.968	184.924.324.368	(21.999.432.600)	11 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	172.207.261.732	170.277.585.132	(1.929.676.600)	1 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.716.495.236	14.646.739.236	(20.069.756.000)	58 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.272.620.897	17.627.727.382	2.355.106.485	15 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.018.117.865	15.726.935.510	708.817.645	5 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	254.503.032	1.900.791.872	1.646.288.840	647 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.498.870.162	7.531.860.162	32.990.000	0 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.498.870.162	7.531.860.162	32.990.000	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.304.190.314	12.608.920.314	1.304.730.000	12 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.102.275.314	11.102.275.314	0	0 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	201.915.000	1.506.645.000	1.304.730.000	646 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.053.675.374	2.804.925.374	(248.750.000)	8 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.871.155.374	2.747.205.374	(123.950.000)	4 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	182.520.000	57.720.000	(124.800.000)	68 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.624.136.921	11.891.871.163	1.267.734.242	12 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.433.936.647	10.553.379.369	119.442.722	1 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	190.200.274	1.338.491.794	1.148.291.520	604 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	438.911.572	417.339.190	(21.572.382)	5 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	438.911.572	417.339.190	(21.572.382)	5 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.699.832	10.811.255	(888.577)	8 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.664.660	10.629.415	(1.035.245)	9 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	35.172	181.840	146.668	417 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.601.283.325	7.711.024.477	(890.258.848)	10 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.221.810.189	7.135.161.093	(86.649.096)	1 %

5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.379.473.136	575.863.384	(803.609.752)	58 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	501.383.175	457.064.291	(44.318.884)	9 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	419.920.619	423.761.415	3.840.796	1 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	81.462.556	33.302.876	(48.159.680)	59 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.418.390.450	1.310.405.165	(107.985.285)	8 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.174.013.664	1.210.500.655	36.486.991	3 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	244.376.786	99.904.510	(144.472.276)	59 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	641.549.794	640.264.419	(1.285.375)	0 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	629.088.002	627.802.627	(1.285.375)	0 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	12.461.792	12.461.792	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	796.517.953	796.517.953	0	0 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	795.517.953	795.517.953	0	0 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	795.517.953	795.517.953	0	0 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.039.854.000	45.795.279.000	(244.575.000)	1 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.305.000	16.305.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.700.000	5.700.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	7.205.000	7.205.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	3.400.000	3.400.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.851.451.000	28.851.451.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	28.851.451.000	28.851.451.000	0	0 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.412.883.000	10.412.883.000	0	0 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	10.412.883.000	10.412.883.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.774.000.000	3.774.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.774.000.000	3.774.000.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.955.215.000	2.710.640.000	(244.575.000)	8 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.265.940.000	2.235.640.000	(30.300.000)	1 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	459.775.000	348.700.000	(111.075.000)	24 %

5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	229.500.000	126.300.000	(103.200.000)	45 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.614.810.549	15.035.210.549	(579.600.000)	4 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	528.964.800	528.964.800	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	528.964.800	528.964.800	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.524.000	97.524.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.524.000	97.524.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000	1.052.961.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000	1.052.961.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.215.800	101.215.800	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.215.800	101.215.800	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	596.591.100	16.991.100	(579.600.000)	97 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	596.591.100	16.991.100	(579.600.000)	97 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000	2.646.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000	2.646.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000	661.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000	661.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	138.915.000	138.915.000	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	138.915.000	138.915.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.270.806.849	3.270.806.849	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	409.846.395	409.846.395	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.654.150	1.654.150	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	105.306.304	105.306.304	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.754.000.000	2.754.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.184.000.000	5.184.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.184.000.000	5.184.000.000	0	0 %

5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	487.260.000	487.260.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	487.260.000	487.260.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	306.230.960	306.230.960	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.600.000	64.600.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.600.000	64.600.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.781.058	7.781.058	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.781.058	7.781.058	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400	5.069.400	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400	5.069.400	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	794.262	794.262	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	794.262	794.262	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240	2.240	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240	2.240	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	126.279.840	126.279.840	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	126.279.840	126.279.840	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	2.900.000	2.900.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.750.000	1.750.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	1.150.000	1.150.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000	410.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	0	0 %

5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	22.443.141.000	22.443.141.000	0	0 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	22.443.141.000	22.443.141.000	0	0 %
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	22.443.141.000	22.443.141.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.766.924.118	255.206.588.360	(38.560.335.758)	13 %
5.1.02.01	Belanja Barang	69.214.092.537	57.488.536.319	(11.725.556.218)	17 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.746.938.059	56.053.178.716	(11.693.759.343)	17 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.110.146.184	1.204.745.450	(4.905.400.734)	80 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.266.183.350	4.034.685.500	(231.497.850)	5 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.580.000	2.580.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	376.808.500	376.808.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	129.400.000	189.400.000	60.000.000	46 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	405.500.000	331.500.000	(74.000.000)	18 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	881.849.700	918.789.325	36.939.625	4 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.064.735.850	1.031.272.350	(33.463.500)	3 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	98.793.000	98.793.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.958.339.884	3.678.943.478	(279.396.406)	7 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	249.827.900	264.906.250	15.078.350	6 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.750.000	7.000.000	(2.750.000)	28 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	36.830.000	36.830.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	700.000	700.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.881.931.450	2.510.097.300	(371.834.150)	13 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	848.394.750	748.212.300	(100.182.450)	12 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.162.520.285	3.624.489.185	(538.031.100)	13 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.745.000	25.400.000	(15.345.000)	38 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	219.846.750	138.895.000	(80.951.750)	37 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	357.973.000	333.754.000	(24.219.000)	7 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	129.000.000	130.100.000	1.100.000	1 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.378.990.947	7.440.609.383	61.618.436	1 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	699.117.327	419.704.552	(279.412.775)	40 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.592.294.000	10.485.414.000	(1.106.880.000)	10 %

5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.150.343.682	1.849.511.893	(300.831.789)	14 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	517.578.000	521.690.000	4.112.000	1 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.390.926.000	10.615.646.000	(1.775.280.000)	14 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.312.430.000	2.003.145.000	(309.285.000)	13 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	211.680.000	199.080.000	(12.600.000)	6 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88.950.000	88.950.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	31.590.000	17.100.000	(14.490.000)	46 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.667.085.000	1.124.085.000	(543.000.000)	33 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	56.000.000	56.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	550.850.000	550.850.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	64.960.000	5.355.000	(59.605.000)	92 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	367.755.000	88.320.000	(279.435.000)	76 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	482.537.500	61.426.250	(421.111.250)	87 %
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	27.800.000	0	(27.800.000)	100 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	503.000.000	493.000.000	(10.000.000)	2 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.500.000	38.500.000	(14.000.000)	27 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	16.625.000	6.000.000	(10.625.000)	64 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	352.070.000	300.890.000	(51.180.000)	15 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.467.154.478	1.435.357.603	(31.796.875)	2 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	10.800.000	10.800.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.456.354.478	1.424.557.603	(31.796.875)	2 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.826.037.171	125.519.170.631	(18.306.866.540)	13 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.069.414.944	88.209.756.644	(15.859.658.300)	15 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.470.400.000	926.850.000	(543.550.000)	37 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.524.145.000	14.076.225.000	(3.447.920.000)	20 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	108.500.000	108.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	725.150.000	128.500.000	(596.650.000)	82 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	9.600.000	8.000.000	(1.600.000)	17 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	295.790.000	248.940.000	(46.850.000)	16 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	626.400.000	626.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.514.650.000	10.843.200.000	(4.671.450.000)	30 %

5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	32.053.466.901	32.738.859.101	685.392.200	2 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	274.577.500	39.100.000	(235.477.500)	86 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	711.750.000	492.750.000	(219.000.000)	31 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.000.000	192.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	66.000.000	66.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	160.200.000	125.400.000	(34.800.000)	22 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	329.000.000	296.750.000	(32.250.000)	10 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.399.650.000	19.651.850.000	(3.747.800.000)	16 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	167.950.000	153.950.000	(14.000.000)	8 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	197.520.000	178.320.000	(19.200.000)	10 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	620.450.000	564.550.000	(55.900.000)	9 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.615.500.000	1.402.200.000	(213.300.000)	13 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	105.450.000	108.350.000	2.900.000	3 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.200.000	12.000.000	(1.200.000)	9 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	55.500.000	55.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	92.000.000	51.200.000	(40.800.000)	44 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000	6.000.000	(30.000.000)	83 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.000.000	17.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	85.750.000	38.500.000	(47.250.000)	55 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	308.900.000	152.600.000	(156.300.000)	51 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	225.220.000	246.720.000	21.500.000	10 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	457.620.000	422.070.000	(35.550.000)	8 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.473.340.543	1.410.510.543	(62.830.000)	4 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	126.000.000	100.600.000	(25.400.000)	20 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.128.105.000	622.095.000	(506.010.000)	45 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	176.235.000	132.437.000	(43.798.000)	25 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	335.000.000	321.500.000	(13.500.000)	4 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.266.395.000	1.557.330.000	(1.709.065.000)	52 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	30.000.000	12.000.000	(18.000.000)	60 %

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.149.172.120	26.680.707.880	(468.464.240)	2 %
5.1.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.958.238.400	21.958.238.400	0	0 %
5.1.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.675.560.600	4.293.572.080	(381.988.520)	8 %
5.1.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.857.640	110.553.360	(22.304.280)	17 %
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	382.515.480	318.344.040	(64.171.440)	17 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	722.275.000	774.668.000	52.393.000	7 %
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	419.450.000	459.450.000	40.000.000	10 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	43.500.000	43.500.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	33.000.000	33.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.000.000	0	(2.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	8.680.000	5.480.000	(3.200.000)	37 %
5.1.02.02.04.0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.250.000	8.250.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	77.895.000	60.460.000	(17.435.000)	22 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	78.000.000	54.000.000	(24.000.000)	31 %
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	60.528.000	60.528.000	100 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	675.000.000	568.500.000	(106.500.000)	16 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	353.000.000	246.500.000	(106.500.000)	30 %
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	72.000.000	72.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.027.511.107	6.667.101.107	(1.360.410.000)	17 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	33.240.000	33.240.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	3.807.229.670	3.008.819.670	(798.410.000)	21 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	757.000.000	725.000.000	(32.000.000)	4 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.071.041.437	781.041.437	(290.000.000)	27 %

5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.301.000.000	1.311.000.000	10.000.000	1 %
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.058.000.000	808.000.000	(250.000.000)	24 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	235.500.000	235.500.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	148.500.000	148.500.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	87.000.000	87.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.947.164.000	2.382.937.000	(564.227.000)	19 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	50 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.929.164.000	2.373.937.000	(555.227.000)	19 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.707.161.910	4.912.410.910	(794.751.000)	14 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.765.033.000	2.573.581.000	(191.452.000)	7 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.376.887.000	1.333.214.000	(43.673.000)	3 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	372.207.000	352.368.000	(19.839.000)	5 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	128.669.000	128.669.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	43.600.000	43.600.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62.370.000	57.750.000	(4.620.000)	7 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	108.850.000	99.350.000	(9.500.000)	9 %
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	28.000.000	28.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.850.000	75.530.000	(1.320.000)	2 %
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	4.250.000	0	(4.250.000)	100 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	163.350.000	155.100.000	(8.250.000)	5 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)	25 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.776.928.910	2.173.629.910	(603.299.000)	22 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.263.920.910	1.995.389.910	(268.531.000)	12 %

5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	513.008.000	178.240.000	(334.768.000)	65 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.200.000	165.200.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	165.200.000	165.200.000	0	0 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	49.352.168.000	42.092.052.000	(7.260.116.000)	15 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.352.168.000	42.092.052.000	(7.260.116.000)	15 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.806.458.000	15.702.332.000	(5.104.126.000)	25 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.545.710.000	26.389.720.000	(2.155.990.000)	8 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	967.228.000	494.182.000	(473.046.000)	49 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	952.828.000	479.782.000	(473.046.000)	50 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26.300.000	13.750.000	(12.550.000)	48 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	800.750.000	397.500.000	(403.250.000)	50 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	105.778.000	68.532.000	(37.246.000)	35 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.400.000	14.400.000	0	0 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.400.000	14.400.000	0	0 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.700.236.500	24.700.236.500	0	0 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.700.236.500	24.700.236.500	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.700.236.500	24.700.236.500	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	17.778.689.376	16.254.169.768	(1.524.519.608)	9 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.306.000.000	1.306.000.000	0	0 %
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.306.000.000	1.306.000.000	0	0 %
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.306.000.000	1.306.000.000	0	0 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.392.117.108	13.867.597.500	(1.524.519.608)	10 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.429.957.108	6.379.957.500	(49.999.608)	1 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.132.500.000	4.346.250.000	213.750.000	5 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.297.457.108	2.033.707.500	(263.749.608)	11 %

5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.376.360.000	5.876.040.000	(1.500.320.000)	20 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.376.360.000	5.876.040.000	(1.500.320.000)	20 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.585.800.000	1.611.600.000	25.800.000	2 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.509.000.000	1.534.800.000	25.800.000	2 %
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	76.800.000	76.800.000	0	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.080.572.268	1.080.572.268	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.080.572.268	1.080.572.268	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.080.572.268	1.080.572.268	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.442.400.000	24.389.800.000	(52.600.000)	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.175.800.000	3.123.200.000	(52.600.000)	2 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	175.800.000	123.200.000	(52.600.000)	30 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	175.800.000	123.200.000	(52.600.000)	30 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	17.163.600.000	17.163.600.000	0	0 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	15.180.000.000	15.180.000.000	0	0 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	15.180.000.000	15.180.000.000	0	0 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.983.600.000	1.983.600.000	0	0 %
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.983.600.000	1.983.600.000	0	0 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.048.000.000	4.048.000.000	0	0 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.923.000.000	3.923.000.000	0	0 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.923.000.000	3.923.000.000	0	0 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	125.000.000	125.000.000	0	0 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	125.000.000	125.000.000	0	0 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000	55.000.000	0	0 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000	55.000.000	0	0 %

5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	55.000.000	55.000.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	138.507.796.623	136.604.462.803	(1.903.333.820)	1 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.219.392.663	20.833.248.409	(386.144.254)	2 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	66.000.000	61.500.000	(4.500.000)	7 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	57.200.000	52.700.000	(4.500.000)	8 %
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	57.200.000	52.700.000	(4.500.000)	8 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	8.800.000	8.800.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	8.800.000	8.800.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.551.727.500	1.571.727.500	20.000.000	1 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.551.727.500	1.571.727.500	20.000.000	1 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	126.787.500	126.787.500	0	0 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	271.500.000	271.500.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	480.000.000	500.000.000	20.000.000	4 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	23.440.000	23.440.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000	650.000.000	0	0 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.137.500	22.137.500	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	22.137.500	22.137.500	0	0 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	22.137.500	22.137.500	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.883.233.813	1.875.661.309	(7.572.504)	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.883.233.813	1.875.661.309	(7.572.504)	0 %
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	600.000	0	(600.000)	100 %
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.882.633.813	1.875.661.309	(6.972.504)	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.019.852.900	965.529.900	(54.323.000)	5 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	482.191.450	429.518.450	(52.673.000)	11 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	482.191.450	429.518.450	(52.673.000)	11 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	537.661.450	536.011.450	(1.650.000)	0 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	530.061.450	528.411.450	(1.650.000)	0 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.600.000	7.600.000	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	281.930.000	236.560.000	(45.370.000)	16 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	281.930.000	236.560.000	(45.370.000)	16 %

5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.365.000	12.365.000	0	0 %
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	37.620.000	10.800.000	(26.820.000)	71 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	231.945.000	213.395.000	(18.550.000)	8 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.198.634.350	4.162.041.600	(36.592.750)	1 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.661.489.350	1.625.566.350	(35.923.000)	2 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	289.298.650	272.773.650	(16.525.000)	6 %
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	3.135.000	3.135.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.318.000.000	1.298.602.000	(19.398.000)	1 %
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	50.183.200	50.183.200	0	0 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	872.500	872.500	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.537.145.000	2.536.475.250	(669.750)	0 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.537.145.000	2.536.475.250	(669.750)	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	864.240.500	839.898.000	(24.342.500)	3 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	9.847.500	1.125.000	(8.722.500)	89 %
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	4.125.000	1.125.000	(3.000.000)	73 %
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	5.722.500	0	(5.722.500)	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	811.223.000	795.603.000	(15.620.000)	2 %
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	603.000	603.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	15.620.000	0	(15.620.000)	100 %
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	720.000.000	720.000.000	0	0 %
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	38.220.000	38.220.000	0	0 %
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	38.220.000	38.220.000	0	0 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	350.000	350.000	0	0 %
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	350.000	350.000	0	0 %
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.600.000	4.600.000	0	0 %
5.2.02.08.08.0002	Belanja Modal Wave Generator and Absorber	4.600.000	4.600.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.692.900.000	9.546.550.000	(146.350.000)	2 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.670.020.000	9.524.020.000	(146.000.000)	2 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	8.759.000.000	8.759.000.000	0	0 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	289.000.000	263.000.000	(26.000.000)	9 %

5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	622.020.000	502.020.000	(120.000.000)	19 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.880.000	22.530.000	(350.000)	2 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	9.000.000	9.000.000	0	0 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.880.000	10.530.000	(350.000)	3 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	142.164.500	152.583.000	10.418.500	7 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	142.164.500	152.583.000	10.418.500	7 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	111.768.000	111.768.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	0	17.582.500	17.582.500	100 %
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	30.396.500	23.232.500	(7.164.000)	24 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	116.112.000	21.000.000	(95.112.000)	82 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	116.112.000	21.000.000	(95.112.000)	82 %
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	21.000.000	21.000.000	0	0 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	95.112.000	0	(95.112.000)	100 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.815.000	13.415.000	(2.400.000)	15 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.815.000	13.415.000	(2.400.000)	15 %
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	15.815.000	13.415.000	(2.400.000)	15 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.364.644.600	1.364.644.600	0	0 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.364.644.600	1.364.644.600	0	0 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.364.644.600	1.364.644.600	0	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.255.627.400	33.211.437.834	3.955.810.434	14 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.693.237.401	32.649.047.835	3.955.810.434	14 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.488.444.401	32.444.254.835	3.955.810.434	14 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	569.070.000	346.662.000	(222.408.000)	39 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.466.078.000	2.803.358.000	(662.720.000)	19 %
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	534.560.001	534.560.001	0	0 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.243.182.400	23.243.182.400	0	0 %
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	0	3.929.563.434	3.929.563.434	100 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	675.554.000	306.929.000	(368.625.000)	55 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	745.000.000	745.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	535.000.000	535.000.000	100 %

5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	204.793.000	204.793.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	204.793.000	204.793.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	562.389.999	562.389.999	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	562.389.999	562.389.999	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	562.389.999	562.389.999	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.123.752.000	78.650.752.000	(5.473.000.000)	7 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.425.183.000	59.051.183.000	(4.374.000.000)	7 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.425.183.000	59.051.183.000	(4.374.000.000)	7 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.870.183.000	58.496.183.000	(4.374.000.000)	7 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	455.000.000	455.000.000	0	0 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.810.119.000	8.360.119.000	(450.000.000)	5 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.185.119.000	7.735.119.000	(450.000.000)	5 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.185.119.000	7.735.119.000	(450.000.000)	5 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	625.000.000	625.000.000	0	0 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	625.000.000	625.000.000	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	800.000.000	760.000.000	(40.000.000)	5 %
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	800.000.000	760.000.000	(40.000.000)	5 %
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	800.000.000	760.000.000	(40.000.000)	5 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	11.088.450.000	10.479.450.000	(609.000.000)	5 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.994.325.000	10.385.325.000	(609.000.000)	6 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	10.994.325.000	10.385.325.000	(609.000.000)	6 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	94.125.000	94.125.000	0	0 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	94.125.000	94.125.000	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.909.024.560	3.909.024.560	0	0 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.566.660	10.566.660	0	0 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.838.160	1.838.160	0	0 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.352.160	1.352.160	0	0 %
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	486.000	486.000	0	0 %
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	8.728.500	8.728.500	0	0 %
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	8.728.500	8.728.500	0	0 %

5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	101.400.000	101.400.000	0	0 %
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	101.400.000	101.400.000	0	0 %
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	101.400.000	101.400.000	0	0 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.247.057.900	3.247.057.900	0	0 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.247.057.900	3.247.057.900	0	0 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.247.057.900	3.247.057.900	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.802.996.191	8.210.335.067	(6.592.661.124)	45 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.802.996.191	8.210.335.067	(6.592.661.124)	45 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.802.996.191	8.210.335.067	(6.592.661.124)	45 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.802.996.191	8.210.335.067	(6.592.661.124)	45 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	14.802.996.191	8.210.335.067	(6.592.661.124)	45 %
5.4	BELANJA TRANSFER	287.401.326.030	283.119.576.030	(4.281.750.000)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.937.866.088	1.937.866.088	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.626.567.513	1.626.567.513	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.626.567.513	1.626.567.513	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.626.567.513	1.626.567.513	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.298.575	311.298.575	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.298.575	311.298.575	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.298.575	311.298.575	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	285.463.459.942	281.181.709.942	(4.281.750.000)	1 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	285.463.459.942	281.181.709.942	(4.281.750.000)	1 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	272.618.209.942	272.618.209.942	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	272.618.209.942	272.618.209.942	0	0 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.845.250.000	8.563.500.000	(4.281.750.000)	33 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.845.250.000	8.563.500.000	(4.281.750.000)	33 %
	Jumlah Belanja	1.128.602.035.584	1.056.508.729.050	(72.093.306.534)	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(89.811.839.890)	(20.000.000.000)	69.811.839.890	-78 %

6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
6.1.01.05.01.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0 %	
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	0	0	0	0 %	
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0 %	
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %	
6.2.02.02.01.00001	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %	
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	0	0	0	0 %	
	Pembayaran Netto	89.811.839.890	20.000.000.000	(69.811.839.890)	78 %	

